

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Demokratik Kongo menjadi negara penghasil kobalt terbesar dunia dengan perkiraan 70% dari produksi global. Banyaknya kobalt di Kongo menjadi pusat perhatian dunia apalagi semenjak derasnya arus globalisasi dan maraknya transisi energi bersih. Kobalt berperan sebagai elemen utama baterai lithium-ion yang digunakan untuk banyak produk teknologi mulai dari smartphone hingga kendaraan listrik (*electric vehicles/EV*). Kobalt memungkinkan baterai lithium-ion menjadi lebih efisien dan bertenaga dalam jangka waktu lama. Singkatnya, kobalt merupakan aspek utama dalam peralihan ke sumber energi berkelanjutan. Kobalt sebagai bahan utama dalam baterai kendaraan listrik, sering kali disebut sebagai bagian dari transisi menuju sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan sama seperti matahari, angin, bioenergi, dan lainnya. Penggunaannya sangat penting untuk membatasi emisi karbon dari mesin pembakaran internal, serta menciptakan solusi listrik untuk industri lainnya. Ini bahkan diperkirakan menjadi kunci untuk membatasi kenaikan suhu global bawah 2° C atau 1,5°C pada tahun 2050 (IRENA, 2018).

Tingginya permintaan kobalt global untuk percepatan transisi energi bersih tidak serta merta membawa dampak positif. Kongo memiliki cadangan kobalt terbesar dan menghasilkan dua puluh kali lipat jumlah kobalt dari tambang mereka dibandingkan negara lain mana pun (USGS, 2021). Kongo yang memegang peranan

kunci sebagai produsen kobalt terbesar dunia dengan nilai total potensi mencapai sekitar USD 25 triliun. Meskipun memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi di kawasan Afrika, Republik Demokratik Kongo masih tergolong sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sekitar 60% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan rata-rata per kapita di negara ini diperkirakan hanya mencapai USD 550 per tahun, angka yang jauh tertinggal dibandingkan rata-rata pendapatan global yang mencapai USD 17.440 per tahun. Konsumsi harian masyarakat Kongo yang bekerja di tambang artisanal skala kecil (ASM) hanya £ 2,60 (USD 3,50) (The Guardian, 2021).

Letak geografis Kongo yang kaya akan sumber daya mineral kobalt menjadikannya sebagai target investasi yang menjanjikan bagi perusahaan-perusahaan dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa Kongo dijajah oleh Belgia pada tahun 1885 dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960. Setelah memperoleh kemerdekaan, Kongo masih harus terjebak dalam kediktatoran militer dan perang saudara. Setelah kurang lebih 32 tahun di bawah kediktatoran militer Mobutu dan konflik bersenjata membuat kondisi negaranya sangat tidak stabil (BBC, 2023). Selama masa penjajahan, endapan kobalt skala besar pertama yang ditemukan di Kongo pada tahun 1914 oleh sebuah perusahaan tambang Belgia (Gulley, 2022). Sejarah kolonisasi ini sedikit banyaknya akan mengontekstualisasikan bagaimana ekstraksi yang dipimpin asing yang terjadi di dalam negeri. Meskipun memiliki sejarah yang kelam hubungan Kongo

dan Belgia masih berlanjut hingga saat ini, karena investor asing mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam Kongo.

Saat ini, sebagian besar penyulingan kobalt dunia terjadi di Tiongkok dan ini merupakan produk *Going Out Strategy*, sebuah rencana pemerintah Tiongkok tahun 1999 yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan mengamankan mineral dan sumber daya khususnya dari Afrika dan Asia (Cobalt Institute, 2022) (Gulley, 2022). Seperti yang telah dibahas, sejarah kolonialisme Kongo mempengaruhi kendali mereka atas sumber daya mereka saat ini, kondisi ini mengungkapkan bagaimana kolonialisme direproduksi melalui kobalt. Pada tahun 1960, tiga hari sebelum Kongo memproklamasikan kemerdekaan mereka, Belgia membubarkan perusahaan pertambangannya, yang mengakibatkan Kongo memiliki sedikit kendali atas pemegang saham swasta atas aset negaranya (Goncharov, 1963). Perusahaan pertambangan kobalt terbesar yang beroperasi di Kongo berasal dari Tiongkok. Bahkan perusahaan tambang milik Kongo sendiri, *Gécamines* didanai oleh pemerintah Tiongkok.

Pada 2006, setelah transisi politik dan Presiden Joseph Kabila terpilih, Tiongkok mengambil langkah yang proaktif untuk melibatkan pemerintahannya mengingat saat kampanye Presiden Joseph yang mengharapkan dukungan-dukungan finansial dari berbagai negara (Shirambere, 2020). Hal ini mencapai puncak pada tahun 2008 dalam kesepakatan sumber daya untuk infrastruktur senilai USD 6 miliar. Dalam kesepakatan tersebut Tiongkok akan menginvestasikan USD 3 miliar dalam

pertambangan dan USD 3 miliar dalam sektor infrastruktur, seperti konstruksi jalan utama, jalur rel, serta sarana transportasi, dan lainnya. Perjanjian ini menjadi langkah penting dalam hubungan Tiongkok-Kongo. Kesepakatan ini memberi Tiongkok akses ke cadangan tembaga dan kobalt bermutu tinggi yang besar (Kabemba, 2016).

Kondisi Kongo yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh permintaan tinggi akan kobalt, tetapi minim hilirisasi produk tambang menyebabkan Kongo terjebak dalam posisi sebagai penghasil bahan mentah tanpa kemampuan untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi yang pada akhirnya akan terus bergantung pada ekonomi dan teknologi Tiongkok. Keterlibatan Tiongkok dalam sektor pertambangan kobalt di Kongo membawa implikasi yang luas bukan hanya aspek ekonomi dan politik tetapi juga bagi lingkungan Kongo sendiri. Sekilas, investasi yang dilakukan Tiongkok akan menguntungkan bagi Kongo tapi pada kenyataan banyaknya investasi yang diberikan Tiongkok malah merugikan lingkungan dan masyarakat Kongo itu sendiri.

Dengan maraknya investasi yang dilakukan Tiongkok pun turut membuat dampak terhadap kondisi lingkungan Kongo. Kobalt dengan cepat berubah menjadi bahan kimia yang mematikan karena pembuangan beracun menghancurkan lingkungan mulai dari mencemari air, udara, sampai tanaman. Konsentrasi kobalt yang tinggi bahkan telah dikaitkan dengan kematian tanaman dan cacing, yang sangat penting untuk kesuburan tanah. Masyarakat Kongo khususnya yang tinggal di daerah pertambangan seperti Katanga mengalami peningkatan jumlah penderita penyakit dan

cacat setelah semakin banyaknya aktivitas pertambangan kobalt disana. Setelah ditelusuri ditemukan bahwa akibat polusi pertambangan banyak wanita-wanita hamil yang telah terpapar logam berat dalam level berbahaya bahkan menjadi yang tertinggi dari semua yang dilaporkan yang selanjutnya berdampak pada banyak kelahiran tidak normal disana. Hal ini semakin diperparah oleh minimnya pengetahuan dan edukasi risiko aktivitas pertambangan serta pelayanan kesehatan yang kurang maksimal (Audu, 2023).

Lebih lanjut, semakin banyaknya tambang membuat semakin banyak pula limbah pertambangan yang pada akhirnya mencemari lingkungan misalnya tanaman yang gagal panen akibat kondisi tanah yang telah rusak serta sungai-sungai mati akibat tercemar limbah pertambangan. Beberapa peneliti menemukan kandungan logam berat dan kandungan uranium yang sifatnya radioaktif di sekitar lokasi pertambangan (Deberdt, 2021). Sebuah studi yang dilakukan di Danau Tshangalale yang terletak di dekat kawasan pertambangan, mengungkapkan bahwa ikan-ikan yang ditangkap dari danau tersebut mengandung tingkat kontaminasi kobalt yang signifikan. Paparan kobalt ini dapat dengan mudah mencapai manusia melalui konsumsi ikan maupun penggunaan air dari danau tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Mengingat kobalt diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik sekaligus bersifat radioaktif, keberadaannya dalam rantai makanan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat (Murray, 2022).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk mengkaji topik ini melalui judul “Dampak Investasi Pertambangan Kobalt Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Lingkungan Di Republik Demokratik Kongo (RDK)”. Judul ini membuat peneliti ingin mengulik bahwa dalam proses percepatan transisi energi hijau yang memanfaatkan kobalt sebagai material utama, ternyata terdapat efek samping berupa kerusakan lingkungan di Kongo yang notabennya sebagai pemasok kobalt terbesar dunia. Dimana kerusakan lingkungan sedikit banyaknya juga disebabkan oleh maraknya investasi pertambangan kobalt di Kongo termasuk dari perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, bahkan tak jarang investasi dari Tiongkok dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pertambangan kobalt Kongo telah menunjukkan bagaimana proses transisi energi bersih yang dimaksudkan untuk menyelamatkan planet ini dari pemanasan suhu yang berbahaya, terjebak dalam siklus degradasi lingkungan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai korelasi investasi Tiongkok dalam pertambangan kobalt terhadap kerusakan lingkungan di Kongo.

B. Batasan dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada dampak pertambangan terhadap lingkungan yang ada di Kongo. Penelitian ini secara spesifik akan menjelaskan dampak investasi pertambangan kobalt yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap lingkungan yang ada di Kongo.

- 1) Bagaimana investasi Tiongkok dalam industri pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo?
- 2) Bagaimana investasi pertambangan kobalt Tiongkok berdampak pada kondisi lingkungan di Republik Demokratik Kongo?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana investasi Tiongkok dalam sektor pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana investasi pertambangan kobalt Tiongkok berdampak pada lingkungan Republik Demokratik Kongo.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran investasi Tiongkok terhadap eksploitasi masyarakat dan kerusakan lingkungan di Republik Demokratik Kongo.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi ilmu hubungan internasional kedepannya terhadap peran investasi Tiongkok di Republik Demokratik Kongo.
- 3) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan bacaan para mahasiswa terutama studi ilmu hubungan internasional.

E. Kerangka Konseptual

1) Environmental Security

Environmental security telah berkembang sejak akhir abad ke-20. Pada awalnya, fokus utama adalah pada dampak konflik dan perang terhadap lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini meluas dan mencakup berbagai ancaman terhadap lingkungan serta dampaknya terhadap keamanan manusia dan stabilitas global. *Environmental security* adalah suatu pendekatan yang mengaitkan isu-isu lingkungan dengan keamanan manusia dan negara. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap pemahaman bahwa kerusakan lingkungan dapat memicu konflik, migrasi, dan ketidakstabilan sosial. Menurut Homer-Dixon (1994), kerusakan lingkungan dapat menjadi pemicu konflik ketika sumber daya yang terbatas, seperti air dan tanah, menjadi semakin langka.

Environmental Security dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana sistem ekologi dan sumber daya alam terlindungi dari ancaman yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Menurut Dalby (2002), keamanan lingkungan mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan konflik yang timbul akibat perebutan sumber daya alam. Selain itu, konsep ini juga mencakup dimensi keamanan manusia, yang menekankan pada perlindungan individu dari ancaman lingkungan yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka (Floyd, 2013)

Dalam konteks ini, konsep keamanan lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan upaya melindungi ekosistem, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Wibowo (2023), keamanan lingkungan mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, dan stabilitas sosial. Dalam konteks investasi pertambangan, keamanan lingkungan berfokus pada bagaimana kegiatan ekstraksi sumber daya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Aktivitas penambangan menyebabkan kerusakan habitat alami, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran tanah serta air. Penelitian menunjukkan bahwa praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan sering kali mengabaikan aspek perlindungan lingkungan (Nabila, 2023). Limbah dari proses penambangan dapat mencemari sumber air dan tanah, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Terpapar debu yang mengandung kobalt berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan serta memicu berbagai masalah kesehatan lainnya (Zheng, 2023).

Dari sudut pandang *environmental security*, investasi sektor pertambangan yang dilakukan oleh Tiongkok di Kongo menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat memperparah degradasi lingkungan serta memperburuk kondisi sosial di wilayah terdampak.

2) ***Foreign Direct Investment (FDI)***

Investasi asing langsung (FDI) merujuk pada penanaman modal yang dilakukan oleh individu, korporasi, atau entitas asal suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk memperoleh kendali manajerial atas aset atau kegiatan usaha di negara tujuan investasi. Dengan kata lain, *Foreign Direct Investment* juga diartikan sebagai bentuk investasi lintas negara yang mencakup penanaman modal dalam jangka waktu panjang kepada perusahaan dalam negeri dimana investor memperoleh kepemilikan langsung atau kontrol aset di negara tujuan. Dalam hal FDI berorientasi pada pembelian atau pembangunan fasilitas produksi, pengembangan sumber daya, atau pengoperasian bisnis di luar negeri.

Beberapa ahli seperti Dunning (1993) mengemukakan bahwa *Foreign Direct Investment* biasanya dimotivasi oleh keuntungan dari sumber daya alam, pasar, atau efisiensi produksi. Dalam konteks negara berkembang, *Foreign Direct Investment* sering dianggap sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses pasar global (Blomström & Kokko, 1998). Hady (2004) menjelaskan bahwa investasi asing langsung (FDI) merupakan bentuk investasi riil yang meliputi aktivitas seperti pendirian perusahaan, pembangunan fasilitas industri, serta pembelian aset produktif seperti tanah, bahan baku, dan persediaan. Dalam jenis investasi ini, investor berperan langsung dalam pengelolaan serta pengendalian atas modal yang ditanamkan.

Oleh karena itu, FDI memiliki keterkaitan yang erat dengan keberadaan perusahaan multinasional yang menjalankan operasinya melintasi batas negara.

FDI mempunyai beberapa manfaat bagi negara asal maupun negara tujuan. Bagi negara asal, FDI dapat memberikan akses ke pasar baru, diversifikasi risiko, ataupun potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sementara itu, bagi negara penerima, transfer teknologi dan keahlian manajerial yang diperoleh melalui investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam skala yang signifikan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa FDI juga menimbulkan banyak tantangan seperti potensi eksploitasi sumber daya alam, berdampak negatif terhadap lingkungan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial, terutama bagi negara-negara berkembang.

Bagi Kongo sendiri, FDI telah menjadi salah satu elemen penting terutama di sektor pertambangan dengan ekstraksi sumber daya seperti kobalt. *Multinational Corporation* (MNC) dari berbagai negara terutama Tiongkok telah berinvestasi banyak di industri pertambangan Kongo yang didorong oleh kebutuhan kobalt dunia yang juga semakin tinggi. Namun tak jarang, investasi ini dikaitkan dengan masalah masalah kerusakan lingkungan yang utamanya berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. Dapat dilihat bahwa FDI di sini diwujudkan melalui investasi langsung Tiongkok dalam sektor pertambangan kobalt di Kongo. Bentuk FDI mencakup

pendirian perusahaan tambang, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengoperasian tambang dengan skala besar. Investasi ini bertujuan untuk mengamankan pasokan kobalt yang menjadi bahan baku utama dalam industri baterai kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan. Namun, meskipun FDI berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, tidak dapat dipungkiri dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal sering kali tidak terkontrol.

F. Metodologi Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik untuk memaparkan kondisi yang terjadi, mengelaborasi data yang tersedia, serta menyajikan fakta, argumen, dan pandangan yang relevan terkait dampak investasi pertambangan kobalt oleh Tiongkok terhadap eksploitasi masyarakat dan degradasi lingkungan di Republik Demokratik Kongo.

2) Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi, termasuk literatur akademik, buku, artikel ilmiah, jurnal, pemberitaan dari media massa, serta informasi relevan yang tersedia secara daring dan berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode ini mencakup penelaahan terhadap berbagai literatur dan sumber referensi yang relevan, baik yang diakses secara daring maupun luring, guna memperoleh data dan informasi yang mendukung analisis topik penelitian.

4) **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan fakta dan data kualitatif yang kemudian diolah untuk menghasilkan gambaran terkait peran investasi pertambangan kobalt Tiongkok terhadap eksploitasi masyarakat dan kerusakan lingkungan di Republik Demokratik Kongo.

5) **Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Pendekatan ini diawali dengan pemaparan permasalahan secara umum, kemudian dianalisis secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan dampak investasi pertambangan kobalt oleh Tiongkok terhadap eksploitasi masyarakat dan degradasi lingkungan di Republik Demokratik Kongo.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Environmental Security* (Keamanan Lingkungan)

Konsep *environmental security* pertama kali mengemuka dalam perdebatan internasional mengenai perubahan lingkungan pada akhir 1970-an. Pada tahun 1977, Lester Brown dari *Worldwatch Institute* mengemukakan bahwa isu keamanan lingkungan perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat potensi meningkatnya konflik akibat degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Kekhawatiran serupa turut diangkat dalam laporan *Global 2000* yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1981. Selanjutnya, *Brundtland World Commission* pada tahun 1987 menegaskan kembali urgensi tersebut melalui laporan *Our Common Future*, yang merekomendasikan pengelolaan sumber daya secara global. Pada tahun 1990 dan 1995, *United Nations General Assembly* dan *United Nations Commission on Human Rights* semakin memperluas cakupan *environmental security* dengan mengaitkannya pada isu perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia.

Laporan *Human Development Report* (HDR) tahun 1994 memperkenalkan pendekatan baru mengenai *human security* sebagai perluasan dari konsep keamanan nasional yang bersifat tradisional. Dalam kerangka ini, keamanan nasional terbagi menjadi dua dimensi utama: tradisional dan non-tradisional. Berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang berdampak pada *keamanan manusia* termasuk dalam kategori keamanan non-tradisional. *Commission on Human Security* (CHS), yang dibentuk

pada tahun 2000, mendefinisikan *human security* sebagai upaya perlindungan terhadap aspek-aspek vital kehidupan manusia melalui pendekatan yang menjamin kebebasan dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Berdasarkan klasifikasi ancaman terhadap *human security*, HDR 1994 mengidentifikasi tujuh aspek utama yang menjadi fokus: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, serta keamanan politik (Duce, 2003).

Menurut Barnett 2001, *Environmental security* menghubungkan aspek lingkungan dengan keamanan nasional yang mencakup bagaimana perubahan lingkungan, eksploitasi sumber daya, dan bencana ekologis dapat memengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks *human security*, analisis terhadap *environmental security* berfokus pada perlindungan individu dan komunitas dari ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan sumber daya dapat memperburuk kondisi hidup masyarakat, menyebabkan kelaparan, dan hal yang bernuansa kekerasan.

Beberapa negara dengan kondisi sumber daya melimpah seringkali dikaitkan dengan teori *resource curse* (kutukan sumber daya). Fenomena dimana negara kaya akan sumber daya tak terbarukan seperti logam mulia, berlian, minyak, dan lain-lain, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, konflik yang tinggi, dan masalah sosial yang signifikan dibandingkan negara sumber daya yang lebih sedikit. Konsep ini menekankan bahwa keberadaan sumber daya yang melimpah dapat menyebabkan

lebih banyak masalah daripada manfaat, dengan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi serta konflik kekuasaan (Alfaro, L., & Chauvin, J., 2020).

Ada berbagai pandangan terkait mengapa kelimpahan sumber daya alam tertentu ironisnya bisa menjadi kutukan. Mempunyai cadangan komoditas berharga yang besar dapat mengurangi inovasi ekonomi dan cenderung menciptakan ekonomi yang sangat timpang yang rentan terhadap perubahan harga komoditas global, intervensi asing, dan korupsi lokal. Selain itu, mungkin ada lebih sedikit investasi pada layanan publik, seperti pendidikan, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan lebih sedikit peluang untuk mengembangkan keterampilan politik seperti mediasi dan pembangunan konsensus.

Terdapat pendekatan lain yang juga relevan dengan penelitian ini yakni *political ecology* dan *tragedy of the commons*. *Political ecology* menyoroti bagaimana faktor politik dan ekonomi global memengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan berdampak pada masyarakat lokal. Ini berangkat dari pemikiran bahwa perubahan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi juga oleh dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan negara, hubungan internasional, dan praktik bisnis korporasi. Fokus pendekatan ini adalah bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Serta bagaimana ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan dampak lingkungan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat (Alfaro, L., & Chauvin, J., 2020).

Sedangkan *tragedy of the commons* mengilustrasikan bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat menyebabkan degradasi lingkungan (Hardin, 1968). Ketika setiap individu atau kelompok tertentu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, hasilnya adalah *overexploitation* dari sumber daya tersebut. Karena masing-masing hanya mempertimbangkan besarnya keuntungan langsung, mereka mengabaikan dampak negatif jangka panjang terhadap sumber daya dan komunitas secara keseluruhan.

United Nations Millennium Project (2002) mendefinisikan *environmental security* sebagai perlindungan masyarakat dari ancaman lingkungan yang ditimbulkan baik oleh fenomena alam maupun aktivitas manusia, yang dapat terjadi akibat ketidaktahuan, kelalaian, atau rekayasa, serta bersifat domestik maupun lintas batas negara. Oleh karena itu, *environmental security* memiliki keterkaitan yang kuat dengan degradasi lingkungan, karena kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kesejahteraan manusia serta seluruh makhluk hidup dan komponen tak hidup lainnya. Laporan *Human Development Report* (HDR) 1994 turut menyoroti berbagai bentuk ancaman lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta konsekuensinya terhadap individu, negara, dan ekosistem secara luas. Kerusakan lingkungan ini secara signifikan memengaruhi aspek keamanan non-tradisional, khususnya dalam konteks *human security* (Glenn & Gordon, 2002).

Aktivitas manusia dan aktor antropologis merupakan sumber utama degradasi lingkungan, meskipun faktor-faktor yang disebabkan oleh alam juga berkontribusi

terhadap degradasi lingkungan. Di lingkungan kita, tanah, air, dan udara merupakan sumber utama semua makhluk hidup, karena mereka menyediakan makanan, air tawar, oksigen, dan menopang ekosistem dan keanekaragaman hayati lainnya. Meskipun penyebab dan kategori degradasi lingkungan telah dibahas secara terpisah, sebagian besar faktor saling bergantung, saling terkait, dan memiliki efek lintas jangka panjang satu sama lain. Oleh karena itu, akan ada beberapa pengulangan saat membahas penyebab dan dampaknya.

Peningkatan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim merupakan faktor yang secara langsung memperburuk kondisi lingkungan dan mengintensifkan risiko terhadap *environmental security*. Kahl (2006) menunjukkan bahwa dinamika ini menciptakan jalur ketidakamanan yang kompleks. Penelitian lebih lanjut menggunakan model DPSIR (*Drivers, Pressures, State, Impact, Response*) yang merupakan kerangka kerja analitis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi lingkungan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Model DPSIR menunjukkan bagaimana tekanan terhadap sumber daya dapat menyebabkan perubahan dalam integritas ekosistem yang pada gilirannya berpengaruh pada keamanan manusia (European Environment Agency, 1999).

- a) *Drivers* (Penggerak): Komponen ini mencakup faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku manusia dan menyebabkan tekanan pada lingkungan. Penggerak ini bisa berupa pertumbuhan populasi,

perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, dan faktor sosial budaya. Penggerak memicu permintaan akan sumber daya alam dan layanan ekosistem, yang pada gilirannya dapat mendorong tekanan lingkungan.

- b) *Pressures* (Tekanan): Tekanan merujuk pada aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, seperti polusi, penebangan hutan, penggundulan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tekanan ini dapat mengurangi kualitas lingkungan dan daya dukung ekosistem, serta mengancam kesehatan manusia dan kesejahteraan masyarakat.
- c) *State* (Kondisi): Keadaan lingkungan pada suatu waktu tertentu, yang mencerminkan kualitas dan kuantitas sumber daya alami. Ini mencakup status ekosistem, kualitas udara dan air, keanekaragaman hayati, dan keadaan lahan. Memantau kondisi lingkungan membantu untuk memahami seberapa besar dampak dari tekanan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.
- d) *Impacts* (Dampak): Konsekuensi dari perubahan dalam kondisi lingkungan. Ini bisa berupa efek pada esehatan manusia, kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas hidup, dan kerugian ekonomi. Dampak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh

masyarakat dan dapat berpotensi menyebabkan masalah sosial yang lebih besar.

- e) *Responses* (Respons): Tindakan yang diambil untuk mengatasi atau mengelola dampak negatif dari tekanan lingkungan. Ini dapat berupa kebijakan pemerintah, program konservasi, regulasi lingkungan, pendidikan masyarakat, dan upaya mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, konsep *environmental security* akan dioperasionalkan pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah terkait dampak dan kondisi lingkungan yang diakibatkan maraknya investasi pertambangan kobalt di Kongo. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan suatu negara tidak hanya bergantung pada faktor militer dan politik, tetapi juga pada kemampuan untuk melindungi lingkungan dari degradasi yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana investasi Tiongkok dalam sektor pertambangan kobalt mempengaruhi ekosistem di Kongo. Kobalt merupakan bahan kritis dalam teknologi modern, dan permintaan yang tinggi untuk kobalt seringkali menyebabkan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Dalam hal ini, *environmental security* berupaya mengevaluasi dampak lingkungan yang dihasilkan termasuk kerusakan habitat, pencemaran tanah dan air, serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat setempat akibat limbah industri.

B. *Foreign Direct Investment (Investasi Asing Langsung)*

Investasi asing langsung (FDI) merupakan salah satu karakteristik utama dari dinamika globalisasi yang terus berkembang. FDI memiliki peran strategis dalam proses globalisasi ekonomi melalui kontribusinya dalam mendorong pergerakan lintas negara atas modal, teknologi, dan pengetahuan. Dalam satu dekade terakhir, pola aliran FDI global mengalami transformasi yang cukup signifikan, dengan peningkatan hampir tiga kali lipat. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang mulai muncul sebagai aktor baru yang semakin berpengaruh dalam struktur ekonomi global.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendeskripsikan investasi asing langsung (FDI) sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh individu atau entitas dari suatu negara ke dalam perusahaan yang berada di negara lain, dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh yang substansial dalam proses pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Indikator formal yang digunakan OECD untuk mengklasifikasikan suatu investasi sebagai FDI adalah kepemilikan ekuitas minimal sebesar 10%. Di sisi lain, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mendefinisikan FDI sebagai bentuk investasi yang mencakup alih kepemilikan aset serta kontrol atas perusahaan di luar negeri. UNCTAD secara konsisten menekankan pentingnya FDI dalam mendukung pembangunan ekonomi, mempercepat transfer teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima investasi (Duce, 2003).

Secara umum, FDI berdampak positif pada produktivitas nasional melalui transfer teknologi dan manajemen dari negara asal investor. Peningkatan produktivitas ini dapat meningkatkan output, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor. Selain itu, FDI dapat memicu ekspor dari sektor domestik melalui hubungan industri dan efek *spill-over*, termasuk pengadaan input lokal untuk produksi barang ekspor (Haddad, M., & Harrison, A., 1993).

Untuk memahami fenomena FDI, sejumlah teori telah dikembangkan seiring waktu, mencakup pendekatan dari teori perdagangan internasional klasik hingga teori-teori modern seperti teori ketidaksempurnaan pasar, internalisasi, dan eklektik. Teori perdagangan internasional, yang pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, menekankan konsep keunggulan komparatif, yakni bahwa suatu negara cenderung mengekspor barang yang dapat diproduksi secara efisien dan mengimpor barang yang produksinya kurang efisien. Gagasan ini kemudian diperluas oleh David Ricardo pada tahun 1817, yang menjelaskan bahwa FDI dapat terjadi ketika negara-negara mencari akses ke pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, negara-negara akan mengekspor kelebihan produksinya dan mengimpor barang-barang yang tidak dapat mereka hasilkan secara optimal (Agiomirgianakis et al., 2006).

Teori perdagangan neo-klasik, yang didasarkan pada model Heckscher-Ohlin, berpendapat bahwa pola perdagangan internasional dan aliran modal ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi di masing-masing negara. Dalam kerangka ini, perusahaan multinasional cenderung menanamkan modalnya di negara-negara dengan

biaya produksi yang lebih rendah sebagai strategi untuk memaksimalkan laba. Negara yang memiliki kelimpahan modal akan lebih cenderung mengeksport barang yang bersifat padat modal atau mengalihkan modalnya ke negara lain yang menawarkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi (Wadhwa et al., 2011). Meskipun begitu, teori ini memiliki keterbatasan, khususnya karena tidak memperhitungkan biaya transportasi dalam menjelaskan dinamika perdagangan global dan pergerakan modal. Kelemahan inilah yang kemudian mendorong lahirnya teori ketidaksempurnaan pasar sebagai pendekatan alternatif.

Teori ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection theory*) didasarkan pada asumsi bahwa informasi tidak selalu tersebar merata dan bahwa persaingan di pasar bersifat tidak sempurna. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional cenderung melakukan investasi lintas negara karena memiliki keunggulan spesifik, seperti akses terhadap teknologi unggul atau sumber daya strategis, yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha lokal. Keputusan investasi ini didorong oleh ketidakseimbangan pasar, kemampuan manajerial yang unggul, serta manfaat dari skala ekonomi baik internal maupun eksternal (Wadhwa et al., 2011).

Melengkapi pendekatan tersebut, teori internalisasi yang dikembangkan oleh Buckley dan Casson menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memilih untuk mengelola aktivitas usahanya sendiri di pasar luar negeri guna meminimalkan risiko seperti pencurian teknologi atau ketidakpastian dalam hubungan kontraktual. Rugman dan Verbeke (2008) menambahkan bahwa teori internalisasi dapat dipahami sebagai

kerangka institusional komparatif yang digunakan untuk menganalisis perilaku strategis perusahaan multinasional. Teori ini menawarkan cara untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai mekanisme tata kelola yang digunakan dalam mengelola ketergantungan ekonomi lintas batas (Rugman et al., 2008).

Terakhir, teori elektik (*OLI Framework*) oleh John Dunning (1977) yang menyatakan bahwa perusahaan berinvestasi di luar negeri jika mereka memiliki tiga keunggulan, yaitu;

- a) *Ownership advantage*, perusahaan asing seringkali memiliki keunggulan kompetitif yang khas, seperti penguasaan teknologi, kapasitas inovatif, kekuatan merek dan reputasi, sumber daya manusia yang berkualitas, serta keterampilan manajerial yang unggul—yang tidak dimiliki oleh perusahaan lokal di negara tujuan investasi. Meskipun perusahaan domestik memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konteks lokal, keunggulan-keunggulan tersebut memberikan daya saing yang signifikan bagi perusahaan multinasional.
- b) *Location advantage*, keunggulan yang dimiliki oleh suatu lokasi, seperti ketersediaan sumber daya alam, akses terhadap pasar, biaya produksi yang lebih rendah, lingkungan usaha yang efisien, tingkat risiko yang relatif rendah, serta stabilitas politik, menjadi faktor penarik bagi perusahaan untuk memindahkan kegiatan produksinya ke negara tujuan. Dalam banyak kasus, kondisi-kondisi tersebut menjadikan operasi bisnis

di luar negeri lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan proses produksi di negara asal.

- c) *Internalization advantage*, keuntungan ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kendali penuh atas proses produksi dan distribusi, dibandingkan dengan opsi pelisensian teknologi kepada pihak ketiga. Dengan memilih untuk mengelola operasionalnya secara langsung di luar negeri, perusahaan tetap memiliki kontrol strategis atas kegiatan bisnis internasionalnya. Sebaliknya, melalui skema lisensi, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas pelaksanaan operasional, termasuk kualitas, standar, dan arah strategis kegiatan usaha di pasar tujuan.

Lebih lanjut, Berbagai faktor memengaruhi keputusan investasi, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam faktor domestik dan faktor eksternal. Faktor domestik sendiri terbagi menjadi aspek ekonomi dan non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, elemen-elemen seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dalam produk domestik bruto (PDB), tingkat tabungan nasional, sistem perpajakan, insentif fiskal, ketersediaan sumber daya alam, serta biaya tenaga kerja yang kompetitif menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, faktor non-ekonomi meliputi stabilitas politik serta kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Di sisi lain, faktor eksternal yang turut memengaruhi aliran investasi mencakup apresiasi nilai tukar mata uang negara asal investor, pencabutan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP), serta derajat

keterbukaan ekonomi antarnegara (Alfaro et al., 2017). Oleh karena itu, investor asing cenderung melakukan seleksi yang ketat terhadap negara tujuan investasi berdasarkan potensi keuntungan pasar yang ditawarkan. Menurut Wadhwa (2011) motif utama dari FDI antara lain :

- a) *Resource Seeking*, bertujuan memperoleh faktor-faktor produksi yang efisien, baik dalam sumber daya alam maupun tenaga kerja dengan biaya rendah. Perusahaan melakukan investasi ini demi mengakses input produksi yang tidak tersedia atau terlalu mahal di negara asal.
- b) *Market Seeking*, dilakukan untuk memasuki pasar baru atau mempertahankan posisi di pasar yang telah ada. Jenis investasi ini seringkali dianggap sebagai strategi defensif, di mana perusahaan terdorong oleh kekhawatiran kehilangan pangsa pasar daripada motivasi ekspansi semata.
- c) *Efficiency Seeking*, dilandasi oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi operasional, termasuk pengurangan biaya dan optimalisasi skala ekonomi, dengan cara mengintegrasikan aktivitas produksi lintas negara.
- d) *Strategic Asset Seeking*, investasi yang ditujukan untuk memperoleh atau mengamankan aset-aset strategis, seperti teknologi, jaringan distribusi, atau kemampuan inovasi, guna mencegah dominasi kompetitor terhadap sumber daya penting.

Feldstein (2000) mengemukakan bahwa aliran investasi asing langsung (FDI) memberikan sejumlah manfaat penting. Pertama, FDI memungkinkan diversifikasi kepemilikan modal, sehingga dapat mengurangi risiko investasi. Kedua, integrasi pasar modal secara global mendorong adopsi praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan, standar akuntansi, dan kerangka hukum. Ketiga, mobilitas modal lintas negara secara tidak langsung membatasi ruang gerak pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang tidak efisien, karena adanya tekanan dari dinamika pasar internasional.

Bagi negara-negara berkembang, FDI dipandang sebagai salah satu bentuk pembiayaan eksternal swasta yang memainkan peran penting dalam memengaruhi kondisi ekonomi domestik. FDI umumnya didorong oleh prospek keuntungan jangka panjang melalui aktivitas ekonomi yang dikendalikan secara langsung oleh investor asing. Investasi ini mencakup modal untuk pembangunan fasilitas, proses produksi, distribusi, serta aset yang dapat diinvestasikan, sehingga memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi negara penerima. Lebih dari sekadar instrumen pembentukan modal, FDI juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong transfer teknologi, peningkatan keterampilan, inovasi, penerapan praktik manajerial modern, serta perluasan akses ke jaringan pasar global (Mottaleb et al., 2010).

Mengingat peran strategis investasi asing dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi, negara-negara berkembang menunjukkan antusiasme tinggi dalam menarik arus modal internasional. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap investor asing, berbagai kebijakan diterapkan guna membentuk iklim

investasi yang kompetitif. Khususnya bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, instrumen perpajakan sering dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan daya tarik investasi asing. Bentuk insentif yang ditawarkan meliputi kemudahan prosedural hingga pengenaan tarif pajak yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, negara bersedia menetapkan tarif pajak minimal sebagai strategi untuk mendorong masuknya FDI, yang akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif secara makro terhadap perekonomian nasional (Mottaleb et al., 2010).

Terdapat sejumlah alasan strategis yang mendorong perusahaan untuk melakukan investasi asing langsung (FDI). Salah satu alasan utamanya adalah karena perusahaan multinasional memiliki keunggulan dalam pengetahuan produksi atau keterampilan manajerial, yang apabila diterapkan di pasar luar negeri, berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ketika pasar domestik telah sepenuhnya dikuasai, perusahaan cenderung memperluas operasinya ke luar negeri sebagai langkah ekspansi. Meskipun potensi keuntungan menjadi faktor utama dalam keputusan FDI, terdapat pula sejumlah faktor tambahan yang turut memengaruhi keputusan investasi, seperti kondisi permintaan pasar, hambatan perdagangan, kebijakan pemerintah terkait investasi, tingkat upah tenaga kerja, dan biaya transportasi. Seluruh faktor tersebut berkontribusi terhadap struktur biaya dan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya menentukan tingkat profitabilitas investasi yang dilakukan (Mottaleb et al., 2010).

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai bagaimana proses terjadinya FDI di sektor pertambangan kobalt, dimulai ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok

mengidentifikasi Kongo sebagai lokasi strategis untuk berinvestasi, mengingat kaya akan cadangan kobalt yang sangat dibutuhkan di pasar global, terutama dalam industri baterai dan teknologi. Dengan niat untuk memanfaatkan sumber daya ini, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan investasi melalui berbagai cara, seperti akuisisi perusahaan lokal, membentuk *joint ventures*, atau membangun infrastruktur pertambangan baru. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan akses kepada perusahaan Tiongkok terhadap sumber daya kobalt, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengendalikan proses produksi dan distribusi. Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya,

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok biasanya membawa serta teknologi pertambangan yang lebih maju dan praktik manajemen yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam proses penambangan. Dalam menguraikan proses bagaimana investasi Tiongkok dalam pertambangan kobalt di Kongo, konsep ini akan menilik bagaimana potensi manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh FDI serta potensi dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas pertambangan. Kondisi-kondisi ini akan menjadi aspek kunci yang digunakan dalam menganalisa bagaimana FDI mulai mempengaruhi tidak hanya sektor ekonomi tetapi juga sektor lingkungan di Kongo.